E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://epaper.dpr.go.id

Judul : Lakukan Mitigasi Mitra UMKM Pasca Penutupan Lapak Online Bukalapak
Tanggal : Selasa, 21 Januari 2025
Surat Kabar : Website DPR
Halaman : 1

PARLEMENTARIA, Jakarta - Salah satu platform perdagangan daring, Bukalapak.com Tbk, secara resmi menyatakan akan menutup penuh layanan penjualan produk fisik pada tanggal 9 Februari 2025 mendatang. Keputusan ini diambil lantaran kontribusi penjualan produk fisik di platform tersebut hanya mencapai kurang dari 3 persen terhadap total pendapatan perusahaan, sehingga perlu dilakukan perubahan strategi bisnis. Sebagai perusahaan teknologi pengelola e-commerce karya anak bangsa yang mampu melantai di bursa dengan perolehan Initial Public Offering (IPO) terbesar dalam sejarah BEI, adanya kebijakan ini tentu membawa isu yang berdampak signifikan di antaranya kepastian nasib para pelapak, terutama UMKM. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mengingatkan jajaran pimpinan Bukalapak soal urgensi mitigasi untuk melindungi para mitra UMKM yang terdampak. “Saya meminta Kementerian Perdagangan bisa bergerak cepat untuk melakukan mitigasi terhadap koperasi dan UMKM yang terdampak,” tegas Amin melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria, di Jakarta, Selasa (21/1/2025). Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS itu mengusulkan 4 (empat) langkah mitigasi agar potensi isu tersebut bisa diminimalisir dan dikendalikan. Pertama, Bukalapak perlu memfasilitasi migrasi ke platform Lain dengan membantu para mitra UMKM untuk beralih ke platform e-commerce lain yang masih beroperasi melalui pelatihan dan pendampingan supaya proses adaptasi berjalan lancar. Kedua, memberikan dukungan Finansial, dengan memberikan bantuan modal atau insentif finansial kepada UMKM yang terdampak untuk menjaga kelangsungan usaha mereka selama masa transisi. Ketiga, penguatan kapasitas digital. Menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan literasi digital para pelaku UMKM, sehingga mereka lebih siap menghadapi dinamika pasar digital yang terus berkembang. Keempat, kolaborasi dengan platform lain. Ia menjelaskan pemerintah perlu memfasilitasi dan mendorong kerja sama antara pemerintah, asosiasi, dan platform e-commerce lain untuk menyediakan solusi alternatif bagi para mitra UMKM yang kehilangan akses pasar akibat penutupan ini. “Kami berharap Bukalapak juga dapat memberikan pendampingan dan solusi bagi para mitra UMKM yang terdampak, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sehingga keberlanjutan usaha dan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional tetap terjaga," pungkasnya. Sebagai informasi, berdasarkan data yang diperoleh per bulan Maret 2023, jumlah UMKM yang terdaftar sebagai mitra Bukalapak mencapai 16,8 juta, lalu meningkat signifikan dari 3,4 juta tahun 2019. Dari jumlah tersebut, sekitar 6 juta merupakan pelapak aktif yang secara rutin memanfaatkan platform Bukalapak untuk menjual produk mereka. Penutupan layanan ini diperkirakan dapat menyebabkan potensi kerugian yang signifikan bagi para mitra UMKM. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mencatat bahwa rata-rata pendapatan bulanan pedagang online di Bukalapak berkisar antara Rp5 juta hingga Rp20 juta. Dengan demikian, total potensi kerugian kumulatif dapat mencapai triliunan rupiah per bulan. (um/rdn)